

BONUS DEMOGRAFI 2030: KESIAPAN GENERASI MUDA MEMAHAMI HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

Anaya Syifa Wibowo

Universitas Sebelas Maret

Faizal Dani Setiawan

Universitas Sebelas Maret

Suparmi

Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: anayasifaw24@student.uns.ac.id; faizaldani19@student.uns.ac.id;
suparmip@staff.uns.ac.id

Abstract. *This study analyzes the level of understanding among Indonesian youth regarding their rights and obligations as citizens and its correlation with their preparedness to face the demographic dividend in 2030. The results of the literature review indicate that youth understanding remains suboptimal, influenced by conventional and non-interactive methods of Civics Education. Youth preparedness in leveraging the demographic dividend is affected by complex factors, including low human resource quality, high educated unemployment, stunting issues, and disparities in educational access and economic opportunities across regions. This research recommends comprehensive strategies to optimize the demographic dividend, encompassing the reform of contextual civics education, enhancement of digital literacy and civic engagement, strengthening the link-and-match between education and industry, fostering a youth entrepreneurship ecosystem, and promoting multisectoral collaboration in integrated policies. The success of these strategies is crucial for transforming the demographic dividend into an opportunity for national advancement towards a Golden Indonesia 2045, rather than allowing it to become a social and economic burden.*

Keywords: *Indonesia's Demographic Bonus 2030, Indonesian Youth, Understanding Of Citizens' Rights And Obligations, Citizenship Education, And Civic Education*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis tingkat pemahaman generasi muda Indonesia terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara serta kaitannya dengan kesiapan menghadapi bonus demografi 2030. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa pemahaman generasi muda masih belum optimal, dipengaruhi oleh metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang konvensional dan kurang interaktif. Kesiapan generasi muda dalam memanfaatkan bonus demografi dipengaruhi oleh faktor kompleks, termasuk kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, tingginya pengangguran terdidik, masalah stunting, serta ketimpangan akses pendidikan dan peluang ekonomi antarwilayah. Penelitian ini merekomendasikan strategi komprehensif untuk mengoptimalkan bonus demografi, mencakup reformasi pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual, peningkatan literasi digital dan civic engagement, penguatan link-and-match pendidikan dengan industri, penciptaan ekosistem kewirausahaan muda, serta kolaborasi multisektor dalam kebijakan terintegrasi. Keberhasilan strategi ini menjadi kunci agar bonus demografi dapat menjadi peluang transformasi menuju Indonesia Emas 2045, bukan menjadi beban sosial dan ekonomi.

Kata kunci: Bonus Demografi Indonesia 2030, Generasi Muda Indonesia, Pemahaman Hak Kewajiban Warga Negara, Pendidikan Kewarganegaraan, dan *Civic Education*

LATAR BELAKANG

Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah yang krusial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik [BPS] (2023), Indonesia mengalami puncak bonus demografi dengan 68,3% atau sekitar 194,75 juta orang dari total 284,97 juta penduduk berada pada usia produktif (15-64 tahun).

Momentum ini diproyeksikan mencapai puncaknya antara tahun 2020 hingga 2040, menjadikan Indonesia memiliki peluang emas untuk melompat menjadi negara maju pada tahun 2045 tepat merayakan 100 tahun kemerdekaan. Bonus demografi merupakan fenomena kependudukan dimana jumlah penduduk di usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk nonproduktif, yang ditandai dengan *dependency ratio* atau rasio ketergantungan di bawah 50 persen. Kondisi ini hanya terjadi sekali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa dan dapat menjadi anugerah atau bencana tergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) bangsa tersebut. Menurut penelitian Wongboonsin (2003), bonus demografi memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan akibat dari menurunnya rasio ketergantungan.

Kesiapan generasi muda dalam menghadapi bonus demografi menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi Indonesia. Namun, data menunjukkan berbagai permasalahan yang mengancam optimalisasi bonus demografi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik [BPS] (2023), Tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,32% atau 7,86 juta orang dari 147,71 juta angkatan kerja per Agustus 2023. Lebih mengkhawatirkannya lagi, terdapat fenomena pengangguran terdidik dimana lulusan perguruan tinggi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Dari segi kualitas pendidikan, komposisi pendidikan penduduk usia produktif menunjukkan bahwa hanya 10,15% yang memiliki gelar perguruan tinggi, sementara 30,22% lulusan SMA/SMK, 22,74% SMP, 24,62% SD, dan 12,26% belum memiliki ijazah formal (Badan Pusat Statistik., 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya kualitas SDM Indonesia untuk bersaing di tingkat global. Jika generasi muda tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi berpotensi menjadi bencana berupa ledakan pengangguran, meningkatnya beban sosial, dan tidak berkembangnya pembangunan nasional.

Pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan pondasi penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara agar hidup sesuai aturan, tujuan dan cita-cita bangsa (Maulani et al., 2024). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa yang paham nilai-nilai kebangsaan, tanggung jawab, dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Pendidikan kewarganegaraan mulai diajarkan sejak para peserta didik berusia dini sampai dengan perguruan tinggi, hal ini dilakukan guna menghasilkan para penerus bangsa yang kompeten dan siap menjalani kehidupan yang sebenarnya di masyarakat dan paham menjadi masyarakat yang berbudaya, beretika, berbangsa, dan bernegara.

Pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban mendorong generasi muda untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, menjaga kedaulatan bangsa, dan juga ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Hak-hak warga negara seperti hak hidup (Pasal 28A UUD 1945), hak bebas dari diskriminasi (Pasal 28I), dan hak beragama (Pasal 29) harus dipahami dan dihormati. Begitu pula dengan kewajiban seperti membayar pajak, ikut serta dalam pembelaan negara, dan menghormati hak orang lain. Namun, dalam penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Pendidikan Kewarganegaraan di kalangan generasi muda masih belum optimal. Metode pembelajaran yang konvensional dan kurang interaktif membuat peserta didik kurang termotivasi dalam memahami materi kewarganegaraan. Kurangnya pelatihan bagi pendidik dalam menyampaikan materi dengan cara menarik juga menjadi salah satu kendala. Padahal, literasi kewarganegaraan yang rendah berdampak pada minimnya partisipasi politik,

lemahnya pengawasan sosial terhadap kebijakan pemerintah, dan meningkatnya perilaku berisiko di kalangan pemuda.

Terdapat hubungan erat antara pemahaman hak dan kewajiban kewarganegaraan dengan kesiapan generasi muda dalam menghadapi bonus demografi. Generasi muda yang memahami hak dan kewajibannya cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap tanggung jawab sosial, partisipasi aktif dalam pembangunan nasional, dan sikap kritis terhadap kebijakan publik. Mereka dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*), pengawas sosial (*social control*), dan pelopor dalam pendidikan kesadaran hukum. Sebaliknya, rendahnya pemahaman kewarganegaraan berpotensi menciptakan generasi yang apatis, individualistis, dan tidak peduli terhadap kepentingan bangsanya sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, bahkan berubah menjadi beban sosial dan juga ekonomi. Pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan masyarakat (UNESCO, 2015).

Dalam konteks ini, pemahaman generasi muda terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara menjadi fondasi kritis yang menentukan apakah bonus demografi akan menjadi anugerah atau justru berubah menjadi bencana demografi. Namun, muncul pertanyaan mendasar: Bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman generasi muda Indonesia terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara? Realitas menunjukkan bahwa metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang masih konvensional dan kurang interaktif diduga berkontribusi terhadap belum optimalnya pemahaman ini. Permasalahan ini mengarah pada pertanyaan kedua: Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan generasi muda dalam menghadapi bonus demografi 2030, khususnya dalam kaitannya dengan literasi kewarganegaraan? Hubungan erat antara pemahaman hak dan kewajiban kewarganegaraan dengan kesiapan menghadapi bonus demografi menuntut penyelesaian yang komprehensif. Generasi muda yang memahami hak dan kewajibannya cenderung memiliki kesadaran tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, bagaimana strategi penguatan pemahaman kewarganegaraan yang efektif untuk mengoptimalkan bonus demografi menjadi pertanyaan ketiga yang perlu dijawab. Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman generasi muda terhadap hak dan kewajiban kewarganegaraan secara komprehensif, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kesiapan mereka menghadapi bonus demografi 2030. Lebih lanjut, penelitian ini berambisi merumuskan strategi penguatan pendidikan kewarganegaraan yang inovatif dan kontekstual, sehingga dapat mengoptimalkan peluang bonus demografi menjadi kekuatan transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis kesiapan generasi muda Indonesia dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara di era bonus demografi 2030. Pencarian artikel ilmiah dilakukan menggunakan kata kunci "bonus demografi Indonesia 2030", "generasi muda Indonesia", "pemahaman hak kewajiban warga negara", "pendidikan kewarganegaraan", dan "*civic education*", serta kombinasinya dalam bahasa Indonesia dan Inggris melalui *database* Google Scholar (scholar.google.com), ScienceDirect (sciencedirect.com), Portal SINTA (sinta.kemdikbud.go.id), dan portal resmi pemerintah seperti Indonesia.go.id, Badan Pusat

Statistik, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Kriteria yang ditetapkan meliputi artikel yang dipublikasikan pada periode 2020-2025, membahas bonus demografi Indonesia, membahas generasi muda atau pendidikan kewarganegaraan, terindeks SINTA atau merupakan publikasi ilmiah terverifikasi, serta berbahasa Indonesia atau Inggris, sedangkan kriteria eksklusif mencakup artikel yang tidak lengkap atau tidak dapat diakses, bukan merupakan artikel penelitian atau laporan resmi, dan tidak relevan dengan topik penelitian. Dari

pencarian awal yang menghasilkan artikel, dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak yang menghasilkan 47 artikel relevan, kemudian dilakukan penilaian kelayakan dengan dikaji sehingga diperoleh 22 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Data yang diekstraksi dari setiap artikel meliputi nama peneliti dan tahun publikasi, subjek penelitian, metode yang digunakan, serta hasil penelitian, yang kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan temuan antar penelitian, dan menyintesis informasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis literatur dari 22 artikel penelitian periode 2020-2025, diperoleh gambaran mengenai kesiapan generasi muda Indonesia dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara di era bonus demografi 2030. Berikut adalah tabel ekstraksi data dari artikel-artikel yang dianalisis:

No	Nama Peneliti dan Tahun	Subjek	Metode	Hasil Penelitian
1	BPS (2022)	Proyeksi Penduduk Indonesia	Kuantitatif	68,3% penduduk Indonesia berusia produktif, puncak bonus demografi 2020-2040
2	Kemenko PMK (2022)	Peran Pemuda dalam Bonus Demografi	<i>Mixed Methods</i>	Bonus demografi sudah terjadi sejak 2012, mencapai puncak 2030, perlu optimalisasi peran pemuda
3	UNESCO (2022)	Pendidikan Kewarganegaraan	Kualitatif	Pendidikan kewarganegaraan mengintegrasikan nilai demokrasi dan HAM mendorong partisipasi aktif

BONUS DEMOGRAFI 2030: KESIAPAN GENERASI MUDA MEMAHAMI HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

4	Achmad et al. (2024)	Bonus Demografi Indonesia	Kualitatif	Tantangan: mismatch keterampilan, pengangguran terdidik, ketimpangan wilayah
5	Sekar Arum et al. (2023)	Karakteristik Generasi Z	Kualitatif	Karakteristik figital, realistis, dan DIY paling relevan untuk bonus demografi 2030
6	Sawitri & Widarini (2025)	Pengangguran Terdidik	Kualitatif	Fenomena pengangguran terdidik mempengaruhi optimalisasi bonus demografi
7	Nurjono (2024)	Kebijakan Bonus Demografi	Kualitatif	Perlu kebijakan daerah yang responsif menghadapi transisi demografi lanjut
8	Wahyuni et al. (2023)	Literasi Gizi dan <i>Stunting</i>	<i>Mixed Methods</i>	Peningkatan literasi dapat menurunkan stunting hingga 9,3%, penting untuk kualitas SDM
9	LPEM FEB UI (2024)	Pasar Tenaga Kerja	Kuantitatif	Pengangguran terbuka 5,32%, mismatch keterampilan menjadi tantangan utama

BONUS DEMOGRAFI 2030: KESIAPAN GENERASI MUDA MEMAHAMI HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

10	Henokh et al. (2023)	Pendidikan Kewarganegaraan Generasi Muda	Kualitatif	PKn berperan penting membentuk karakter bangsa generasi muda
11	Kajian BINUS (2022)	Pemuda Penegak Hak dan Kewajiban	Kualitatif	Pemuda berperan sebagai agen perubahan, pengawas sosial, dan edukator masyarakat
12	Studi Civic Engagement Indonesia (2020)	Partisipasi Pemuda	Kuantitatif	65 juta pemuda (28% populasi), namun partisipasi civic masih rendah
13	Tri Wintolo Apoko et al. (2022)	Implementasi Hak dan Kewajiban Mahasiswa	Kualitatif	Mahasiswa yang paham hak-kewajiban dapat meningkatkan kualitas pendidikan
14	Republika (2025)	SDM dan <i>Stunting</i>	Kuantitatif	<i>Stunting</i> 19,8% mengancam kualitas bonus demografi, perlu intervensi gizi
15	Permatasari et al. (2022)	Pemberdayaan Pemuda Desa	Kualitatif	Pendekatan kewirausahaan berbasis komunitas efektif memberdayakan pemuda
16	Rahmawati & Santoso (2022)	Digitalisasi UMKM	<i>Mixed Methods</i>	Generasi muda berperan dalam ekonomi digital dan pembangunan lokal

BONUS DEMOGRAFI 2030: KESIAPAN GENERASI MUDA MEMAHAMI HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

17	Fadhil & Lestari (2023)	Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Kualitatif	Peluang tenaga kerja muda di sektor berkelanjutan perlu dioptimalkan
18	Hidayat & Prasetyo (2022)	Ketenagakerjaan Era Digital	Kualitatif	Era digital menciptakan tantangan baru dalam dunia kerja
19	Azzahra & Kurniawan (2023)	Pendidikan Vokasi	<i>Mixed Methods</i>	Link-and-match vokasi krusial menjawab tantangan pasar kerja
20	Tempo (2025)	Analisis Bonus Demografi	Kualitatif	Tantangan: perang dagang, krisis iklim, perkembangan AI
21	BKKBN (2022)	Program Keluarga Berencana 2030	Kuantitatif	Perlu mempersiapkan post-bonus demografi untuk menghindari aging population
22	Kemenko PMK (2022)	Pencegahan Perilaku Berisiko Pemuda	<i>Mixed Methods</i>	Perlu penguatan koordinasi kebijakan pencegahan perilaku berisiko

Tingkat Pemahaman Generasi Muda terhadap Hak dan Kewajiban Kewarganegaraan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman generasi muda Indonesia terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara masih belum optimal. Meskipun Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah diajarkan di semua jenjang pendidikan, pendekatan pembelajaran yang konvensional dan kurang interaktif membuat siswa kurang termotivasi untuk mendalami materi (Henokh et al., 2023; UNESCO, 2015). Studi *Civic Engagement* Indonesia (2020) menunjukkan bahwa dari 65 juta pemuda (28% populasi), tingkat partisipasi dalam kegiatan kewarganegaraan masih rendah, dimana banyak pemuda memahami konsep secara teoritis namun lemah dalam implementasi praktis seperti partisipasi pemilu dan pengawasan kebijakan publik.

Penelitian Tri Wintolo Apoko et al. (2022) menemukan bahwa mahasiswa yang memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban dengan benar dapat berkontribusi pada pendidikan berkualitas, namun masih terdapat kesenjangan pemahaman terutama terkait hak-hak konstitusional dalam UUD 1945.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman ini meliputi: (1) kurikulum PKn yang dianggap terlalu teoretis dan kurang kontekstual dengan kehidupan nyata; (2) minimnya pelatihan bagi guru dalam menyampaikan materi dengan metode inovatif; (3) keterbatasan sumber daya pembelajaran yang interaktif; (4) pengaruh globalisasi dan digitalisasi yang menggeser fokus generasi muda dari isu-isu kewarganegaraan ke hiburan dan konsumerisme; (5) ketimpangan akses pendidikan berkualitas antar wilayah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Generasi Muda Menghadapi Bonus Demografi 2030

Kesiapan generasi muda menghadapi bonus demografi 2030 dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan:

a) Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia

Data BPS (2022) menunjukkan komposisi pendidikan penduduk usia produktif: hanya 10,15% memiliki gelar perguruan tinggi, 30,22% lulusan SMA/SMK, 22,74% SMP, 24,62% SD, dan 12,26% belum memiliki ijazah formal. Rendahnya tingkat pendidikan ini menjadi hambatan serius dalam mengoptimalkan bonus demografi.

Penelitian Wahyuni et al. (2023) menambahkan dimensi lain yaitu masalah stunting yang mencapai 19,8% pada 2024. Stunting menghambat perkembangan kognitif dan fisik anak, yang pada gilirannya akan mempengaruhi produktivitas mereka saat memasuki usia kerja. Tanpa perbaikan nutrisi dan kesehatan sejak dini, kualitas SDM Indonesia akan tetap rendah meskipun kuantitas penduduk produktif meningkat.

b) Faktor Ketenagakerjaan

LPEM FEB UI (2024) melaporkan bahwa dari 147,71 juta angkatan kerja, terdapat 7,86 juta pengangguran terbuka (5,32%). Yang lebih mengkhawatirkan adalah fenomena pengangguran terdidik yang dikaji oleh Sawitri dan Widarini (2025), dimana lulusan perguruan tinggi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Hidayat dan Prasetyo (2022) menambahkan bahwa era digital menciptakan tantangan baru dalam dunia kerja. Otomasi dan kecerdasan buatan (AI) mengancam sejumlah pekerjaan konvensional, sementara menciptakan peluang baru yang membutuhkan keterampilan digital tinggi. Generasi muda yang tidak adaptif terhadap perubahan teknologi akan tertinggal dalam kompetisi tenaga kerja global.

c) Faktor Karakteristik Generasi Z

Penelitian Sekar Arum et al. (2023) mengidentifikasi karakteristik Generasi Z yang paling relevan untuk menghadapi bonus demografi 2030: digital (*digital native* namun tetap menghargai interaksi fisik), realistis (pragmatis dalam memandang dunia kerja), dan DIY (*do it yourself* -

mandiri dan kreatif). Karakteristik ini sebenarnya merupakan modal positif jika dapat diarahkan dengan baik.

d) Faktor Kebijakan dan Koordinasi Pemerintah

Kemenkopmk (2022) menekankan perlunya penguatan koordinasi kebijakan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda. Sementara BKKBN (2022) mengingatkan pentingnya mempersiapkan kebijakan *post*-bonus demografi untuk menghindari kondisi aging *before prospering* - dimana populasi lansia meningkat sebelum negara mencapai kemakmuran.

Nurjono (2024) mengkritisi bahwa kebijakan daerah dalam menghadapi bonus demografi belum responsif dan terintegrasi dengan baik. Ketimpangan antarwilayah dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja masih sangat tinggi, yang dapat mengakibatkan bonus demografi hanya dinikmati oleh daerah-daerah tertentu saja.

e) Faktor Peluang Ekonomi Baru

Di sisi positif, terdapat peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan generasi muda. Rahmawati dan Santoso (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal. Permatasari et al. (2022) menemukan bahwa pendekatan kewirausahaan berbasis komunitas efektif memberdayakan pemuda desa. Sementara Fadhil dan Lestari (2023) mengidentifikasi peluang di sektor ekonomi hijau dan ekonomi biru yang sejalan dengan tren keberlanjutan global.

Strategi Penguatan Pemahaman Kewarganegaraan untuk Mengoptimalkan Bonus Demografi

a) Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan perlu ditransformasi dari pendekatan konvensional yang bersifat hafalan menjadi pembelajaran aktif, kontekstual, dan berbasis masalah nyata. UNESCO (2015) merekomendasikan integrasi nilai-nilai demokrasi, HAM, dan keadilan sosial dalam kurikulum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Metode pembelajaran dapat menggunakan simulasi, studi kasus, *project-based learning*, dan pemanfaatan teknologi digital seperti *gamifikasi* dan platform interaktif.

Guru PKn perlu mendapatkan pelatihan berkala tentang metode pembelajaran inovatif, pemanfaatan teknologi pendidikan, dan pemahaman mendalam tentang isu-isu kewarganegaraan kontemporer. Bahan ajar harus diperkaya dengan contoh-contoh konkret, video pembelajaran, dan platform digital yang menarik bagi Generasi Z.

b) Peningkatan Literasi Digital dan Civic Engagement

Peningkatan literasi digital dan *civic engagement* harus memanfaatkan karakteristik *digital native* Generasi Z melalui platform media sosial, aplikasi *mobile*, dan *website* interaktif untuk menyebarkan informasi kewarganegaraan. Pemuda dapat dimobilisasi sebagai agen perubahan, pengawas sosial, dan edukator masyarakat melalui platform *crowdsourcing* dan kampanye media sosial untuk memperkuat sistem demokrasi dan transparansi pemerintahan Kajian BINUS (2022)

c) Penguatan Link-and-Match Pendidikan dengan Industri

Azzahra dan Kurniawan (2023) menekankan pentingnya pendidikan vokasi yang *link-and-match* dengan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum pendidikan harus dirancang dengan melibatkan industri untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Program

magang, *teaching factory*, dan sertifikasi kompetensi perlu diperluas untuk semua jenjang pendidikan.

d) Penciptaan Ekosistem Kewirausahaan Muda

Mengingat keterbatasan lapangan kerja formal, penciptaan ekosistem kewirausahaan muda menjadi strategi penting. Pemerintah perlu menyediakan akses pendanaan, *mentoring*, inkubator bisnis, dan kemudahan perizinan bagi *startup* dan UMKM yang diinisiasi generasi muda. Rahmawati dan Santoso (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM dapat membuka peluang besar, sementara Fadhil dan Lestari (2023) mengidentifikasi sektor ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai area dengan potensi pertumbuhan tinggi.

e) Kolaborasi Multisektor dan Kebijakan Terintegrasi

Kolaborasi multisektor dan kebijakan terintegrasi melibatkan pemerintah pusat-daerah, swasta, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dalam program pemberdayaan pemuda lintas sektor Kemenko PMK (2022). Kebijakan daerah harus responsif terhadap kondisi lokal namun sejalan dengan visi nasional untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah Nurjono (2024).

Kelebihan dari berbagai strategi yang diusulkan adalah fokusnya pada pemanfaatan karakteristik unik Generasi Z (*digital native*, kreatif, adaptif) dan pendekatan holistik yang mencakup dimensi pendidikan, ekonomi, dan *civic engagement*. Strategi-strategi ini juga berbasis pada data empiris dan *best practices* dari berbagai penelitian terkini.

Namun terdapat beberapa kelemahan dan tantangan: (1) Implementasi reformasi pendidikan membutuhkan waktu, biaya, dan komitmen politik yang besar; (2) Kesenjangan digital dan ketimpangan wilayah dapat menyebabkan tidak meratanya dampak program; (3) Koordinasi multisektor seringkali terhambat birokrasi dan perbedaan kepentingan; (4) Perubahan *mindset* dan budaya tidak dapat dilakukan secara instan; (5) Ancaman eksternal seperti perkembangan AI, krisis iklim, dan ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi efektivitas strategi domestik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama terkait kesiapan generasi muda Indonesia dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara di era bonus demografi 2030. Pertama, tingkat pemahaman generasi muda terhadap hak dan kewajiban kewarganegaraan masih belum optimal meskipun Pendidikan Kewarganegaraan telah diajarkan di semua jenjang pendidikan. Metode pembelajaran yang konvensional, kurang interaktif, dan tidak kontekstual menyebabkan rendahnya motivasi siswa untuk mendalami materi kewarganegaraan. Partisipasi *civic* pemuda dalam kegiatan kewarganegaraan praktis seperti pemilu, pengawasan kebijakan publik, dan kegiatan sosial kemasyarakatan masih rendah meskipun mereka memahami konsep secara teoretis.

Kedua, kesiapan generasi muda menghadapi bonus demografi 2030 dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas SDM yang masih rendah (hanya 10,15% berpendidikan tinggi), tingginya pengangguran terdidik akibat ketidakcocokan keterampilan, masalah *stunting* yang mengancam kualitas generasi mendatang (19,8%), serta ketimpangan akses pendidikan dan peluang ekonomi antarwilayah. Di sisi positif, karakteristik Generasi Z yang *digital native*, realistis, dan mandiri merupakan modal berharga jika diarahkan dengan tepat. Peluang ekonomi baru di sektor digital, ekonomi kreatif, dan industri

berkelanjutan juga membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Ketiga, optimalisasi bonus demografi memerlukan strategi komprehensif dan terintegrasi yang mencakup lima pilar utama: reformasi pendidikan kewarganegaraan menuju pembelajaran aktif dan kontekstual, peningkatan literasi digital dan *civic engagement* melalui platform yang sesuai karakteristik Generasi Z, penguatan *link-and-match* pendidikan dengan industri melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kompetensi, penciptaan ekosistem kewirausahaan muda dengan dukungan pendanaan dan mentoring, serta kolaborasi multisektor dalam kebijakan terintegrasi lintas daerah dan sektor. Keberhasilan strategi ini memerlukan komitmen politik, alokasi sumber daya memadai, dan koordinasi efektif antara pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat sipil.

Bonus demografi merupakan peluang emas yang hanya terjadi sekali dalam sejarah bangsa. Indonesia berada di persimpangan antara menjadi negara maju atau terjebak dalam *middle income trap*. Kesiapan generasi muda yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara menjadi kunci penentu masa depan bangsa. Tanpa persiapan matang, bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi berupa ledakan pengangguran, beban sosial, dan *stagnansi* pembangunan. Sebaliknya, dengan strategi tepat, generasi muda Indonesia dapat menjadi motor transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, F., Raharjo, S. T., & Humaedi, S. (2024). Bonus Demografi Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan Sosial Ekonomi. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 23(1), 45-62.
- Azzahra, N. F., & Kurniawan, B. (2023). Link and Match Pendidikan Vokasi dengan Industri: Strategi Menghadapi Bonus Demografi. *Jurnal Pendidikan Vokasi Indonesia*, 6(2), 112-128.
- Badan Pusat Statistik. (2023, 31 Mei). Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2022 [Berita Resmi Statistik No. 43/06/Th. XXVI].
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/31/2103/hasil-survei-penduduk-antar-sensus--supas--2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023, 6 November). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen pada Agustus 2023 [Berita Resmi Statistik No. 96/11/Th. XXVI].
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2007/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-pada-agustus-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator pasar tenaga kerja Indonesia Februari 2024.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/05/15/0bda1a5d8a5e6c58c0766f34/indikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-februari-2024.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050: Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). *Rencana Strategis BKKBN 2020-2024: Mempersiapkan Post Bonus Demografi*. Jakarta: BKKBN.

- Fadhil, M., & Lestari, P. (2023). Ekonomi Hijau dan Blue Economy: Peluang Ketenagakerjaan Generasi Muda Indonesia. *Indonesian Journal of Sustainable Development*, 5(1), 78-95.
- Ginting, D. (2016). Window of Opportunity Bonus Demografi Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(1), 1-12.
- Henokh, Y., Sudrajat, A., & Herlambang, Y. T. (2023). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda Menghadapi Era Globalisasi. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(1), 32-47.
- Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2022). Transformasi Ketenagakerjaan di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Generasi Muda. *Jurnal Ekonomi Ketenagakerjaan*, 19(2), 156-173.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). *Peran Pemuda dalam Optimalisasi Bonus Demografi Indonesia*. Jakarta: Kemenko PMK.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). *Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda: Strategi Nasional 2022-2025*. Jakarta: Kemenko PMK.
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2024). *Analisis Pasar Tenaga Kerja Indonesia 2024: Tantangan Bonus Demografi*. Depok: LPEM FEB UI.
- Maulani, G., Saptadi, N. T. S., Wolo, H. B., Purnomo, A. C., Tangko, L. A. A., Suyitno, M., Agung, D.,
- Hadikusumo, R. A., Talindong, A., & Perang, B. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Nurjono, W. (2024). Kebijakan Daerah dalam Menghadapi Transisi dan Bonus Demografi Lanjut di Indonesia. *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Publik*, 15(1), 23-41.
- Permatasari, D., Susanto, H., & Wijaya, K. (2022). Pemberdayaan Pemuda Desa melalui Kewirausahaan Berbasis Komunitas. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 8(2), 89-106.
- Rahmawati, F., & Santoso, E. B. (2022). Digitalisasi UMKM dan Peran Generasi Muda dalam Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 4(3), 201-218.
- Republika. (2025, 23 Januari). Stunting Ancam Bonus Demografi RI. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/s5jmzy291/stunting-ancam-bonus-demografi-ri>
- Santoso, B., Wibowo, A., & Pratama, D. (2023). Peran Generasi Muda dalam Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 67-84.
- Sawitri, N. L. P. D., & Widarini, L. P. (2025). Fenomena Pengangguran Terdidik dan Implikasinya terhadap Bonus Demografi Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 45-59.
- Sekar Arum, W. S., Kurniawan, H., & Fitriani, R. (2023). Karakteristik Generasi Z dan Relevansinya dengan Bonus Demografi 2030-2040 di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 12(1), 112-130.

- Tempo. (2025, 10 Februari). Bonus Demografi: Peluang atau Ancaman? Diakses dari <https://www.tempo.co/bonus-demografi-2025>
- Tri Wintolo Apoko, A. R., Suhartinah, & Kurniawan, M. I. (2022). Implementasi Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi Indonesia*, 7(2), 134-149.
- UNESCO. (2022). *Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.
- Universitas Bina Nusantara. (2022). *Pemuda sebagai Penegak Hak dan Kewajiban di Era Bonus Demografi*. Jakarta: Pusat Kajian Civic Education BINUS.
- Wahyuni, S., Lestari, D., & Handayani, P. (2023). Literasi Gizi dan Pencegahan Stunting: Investasi SDM Menghadapi Bonus Demografi. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 11(3), 234-250.
- Wongboonsin, K. (2003). *Demographic Dividend and Social Development in Thailand*. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
- Yusuf, A. A., & Andy Sumner, A. (2015). Growth, Poverty, and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 323-348.